

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Kontrak Sewa Kampung Susun Bayam Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS — PT Jakarta Propertindo atau Jakpro belum bersepakat dengan warga Kampung Bayam terkait tarif sewa Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara. Meski begitu, Jakpro terus menyiapkan beberapa hal, misalnya kontrak sewa dan pengalihan aset Kampung Susun Bayam kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kampung Susun Bayam, yang lokasinya berdampingan dengan Jakarta Internasional Stadium (JIS), diresmikan pada 12 Oktober 2022 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelum masa jabatannya berakhir. Kampung susun itu dijanjikan sebagai tempat relokasi warga Kampung Bayam yang rumahnya tergusur akibat pembangunan JIS. Namun, janji relokasi itu tak kunjung terlaksana karena belum ada kesepakatan tarif sewa hunian.

Warga keberatan dengan tarif sewa yang ditawarkan Jakpro, yakni Rp 600.000 sampai Rp 700.000 per bulan. Tarif sewa itu mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.

Acep Suwenda, perwakilan warga Kampung Bayam, mengatakan, warga telah melakukan sejumlah upaya untuk menyampaikan aspirasi, misalnya mendirikan tenda di depan JIS dan di depan Balai Kota Jakarta. Namun, belum ada kesepakatan terkait tarif sewa Kampung Susun Bayam.

"Belum ada perkembangan dengan Jakpro. Belum sepakat soal tarif hunian sampai saat ini," ujar Acep yang juga Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kebun Bayam, Senin (19/12/2022).

Kampung Susun Bayam berdiri di atas tanah milik Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta seluas 23 hektar untuk JIS. Tanah ini masih berproses di Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta untuk *inbreng*, yaitu transaksi yang memasukkan aset nontunai, seperti tanah dari para pemegang saham, untuk dijadikan modal perusahaan. Tanah tersebut akan *inbreng* ke Jakpro melalui persetujuan DPRD DKI Jakarta.

Vice President Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarif menuturkan, Jakpro terus mengawal proses penempatan warga ke dalam Kampung Susun Bayam. Hingga kini, Jakpro masih berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta supaya kontrak sewa antara warga dan Jakpro memiliki landasan administratif.

Proses pengalihan aset Kampung Susun Bayam juga masih dalam proses. "Jadi, proses kami lakukan secara paralel antara kontrak sewa dan pengalihan aset dari Jakpro kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Syachrial.

Untuk penempatan warga ke Kampung Susun Bayam, Jakpro berpatokan pada daftar nama yang tercantum dalam surat dari Wali Kota Jakarta Utara.

Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menyebutkan, pihaknya sudah mengusulkan daftar nama yang terverifikasi. "Sampai sekarang kampung susun belum dihuni. Yang penting aspirasi warga bisa tersampaikan. Mudah-mudahan dari Jakpro bisa mengakomodasi," ujar Ali.

(DAN)